

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8082694)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8082694>

Peta Sosial Ekonomi Umat Islam (Ekonomi Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Islam)

Dinny Rahmayani Zebua¹, Riswan Rambe²¹²Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sumatera UtaraEmail : [1dinnyrahmayanii@gmail.com](mailto:dinnyrahmayanii@gmail.com) , [2riswanrambe93@gmail.com](mailto:riswanrambe93@gmail.com)

Abstract

This community development approach seeks to promote economic development at the local/regional level. Although such an approach is likely to involve community development and can be linked to empowerment activities in community action programs that focus on upgrading local infrastructure and promoting local economic development projects. This is a key theme related to community development programs by taking into account the economic principles of Muslims. Community development is known as community development. According to the Director General of Development, it is essentially a continuous dynamic process for the community to realize the desire and expectation of a more prosperous life with a strategy to avoid the possibility of being cornered by the community as the guarantor for access to regional or national development. Community Development becomes a kind of spirit in a development paradigm that is no longer delivered where it has been planned by the highest party or follows western patterns, but becomes a development that is people centered in color. With the development of ideas in the theory of dependency (relationships of dependency, there are dominant parties and dependent parties) who want to be independent and contextual in improving people's welfare. More than that, the bottom-up principle becomes a promising belief on the basis of the failure of various countries to improve the welfare of their people.

Keywords: *Map of Social, Economic, Islamic Ummah*

PENDAHULUAN

Pendekatan pengembangan masyarakat ini berusaha untuk mendorong pembangunan ekonomi pada tingkat lokal/daerah. Kendatipun pendekatan tersebut kemungkinan melibatkan pembangunan masyarakat dan dapat dihubungkan dengan aktivitas- aktivitas pemberdayaan dalam program aksi masyarakat yang berfokus untuk memperbaiki infrastruktur lokal dan mendorong berbagai proyek pembangunan ekonomi lokal. Hal ini adalah tema kunci yang berhubungan dengan program-program pengembangan masyarakat dengan memperhatikan prinsip – prinsip ekonomi umat islam. Istilah "pengembangan masyarakat" mengacu pada proses ini. Menurut Dirjen Pembangunan, pencapaian keinginan dan harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkesinambungan yang melibatkan strategi agar masyarakat tidak terkepung sebagai penjamin akses pembangunan daerah atau nasional. (Suhaimi, 2016)

Dalam paradigma pembangunan yang tidak lagi mengikuti pola barat atau dilakukan di tempat yang telah direncanakan oleh pihak tertinggi, pembangunan masyarakat berubah menjadi semacam semangat. Sebaliknya, itu menjadi perkembangan yang berpusat pada orang dalam warna. Masyarakat yang ingin mandiri dan kontekstual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah mengembangkan teori-teori dalam teori ketergantungan (hubungan ketergantungan, ada pihak yang mendominasi dan ada pihak yang tergantung). Lebih dari itu, kegagalan banyak negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya menjadikan prinsip bottom-up sebagai ide yang penuh harapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini. Sumber data ditemukan dalam makalah jurnal penelitian dan buku-buku yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Metode analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi pembangunan umumnya melihat strategi pembangunan sebagai cara untuk mencapai aspek-aspek tertentu, seperti pertumbuhan (perkembangan), strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar, strategi untuk meningkatkan investasi dan strategi untuk ketergantungan luar negeri dan banyak prioritas lainnya. Model pembangunan konvensional dibagi menjadi empat model, yaitu : 1) model tahapan pertumbuhan linier , 2) teori kelompok dan model perubahan struktur, 3) revolusi ketergantungan internasional dan 4) revolusi anti pasar bebas neoklasik. Selain itu, telah dikembangkan beberapa alternatif teori baru seperti: teori baru pembangunan dan geografi ekonomi, dan teori bisnis baru). Teori yang berkembang ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri dalam hal penekanannya. Strategi pembangunan ini biasanya dilaksanakan secara sekuler sesuai dengan fokus yang diinginkan dan biasanya hanya terkait dengan dimensi materialistik. Ekonomi pembangunan Islam merupakan alternatif sebagai pendekatan pembangunan strategi yang penting, namun harus dipertimbangkan bahwa strategi keseluruhan harus berhasil dalam praktiknya. memenuhi Oleh karena itu, poin-poin tersebut juga dapat digunakan dari perspektif yang berbeda sebagai faktor penting dalam menentukan strategi pembangunan dalam Islam (Jajang, 2021).

Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat

Istilah "pengembangan masyarakat" mengacu pada proses ini. Menurut Dirjen Pembangunan, pencapaian keinginan dan harapan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkesinambungan yang melibatkan strategi agar masyarakat tidak terjebak sebagai pembawa akses dari pembangunan daerah atau nasional (Suhaimi, 2016). Dalam paradigma pembangunan di mana pembangunan tidak lagi dilakukan di daerah yang telah direncanakan oleh pihak tertinggi atau mengikuti pola barat, pembangunan masyarakat menjelma menjadi semacam semangat, namun menjadi pembangunan yang memiliki warna *People Centered*. Seiring berkembangnya teori ketergantungan, pemikir otonom dan kontekstual yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah muncul (dalam hubungan ketergantungan, ada pihak yang dominan dan pihak yang bergantung). Selain itu, prinsip *Bottom-up* menjadi suatu kepercayaan yang meyakinkan yang menjadi dasar Negara untuk mensejahterakan rakyatnya (Suhaimi, 2016).

Informasi tentang pembangunan telah banyak diarahkan oleh negara selama bertahun – tahun. Hal ini didukung oleh ahli ekonom ternama Myrdal (1979 – 1971) dan Seers (1969) yang mana Myrdal memberikan kontribusi besar dalam mengartikulasikan pendekatan statis untuk pembangunan yang ditunjukkan dengan apa yang disebut sebagai pendekatan “Perencanaan sosio – ekonomi terpadu” . Konsep pembangunan yang terdistorsi sejatinya memfokuskan pada ketidaksejahteraan dalam berpendapat dan kesejahteraan yang menemani pertumbuhan ekonomi (Midgeley, 1995)

Ekonomi Islam

Kata Yunani *oikos* (rumah tangga) dan *nomos* (aturan/norma), yang digabungkan membentuk kata ekonomi, mengacu pada metode pengelolaan urusan rumah tangga. Namun pada akhirnya, ekonomi berubah menjadi ilmu yang diterapkan untuk menjalankan

pemerintahan dengan cara melayani kebutuhan masyarakat. Menurut definisi umum, ekonomi adalah studi tentang bagaimana orang memilih di antara sumber daya yang terbatas dengan memuaskan berbagai keinginan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Al-iqtishad, kata Arab untuk ekonomi, secara harfiah diterjemahkan menjadi "mengerjakan sesuatu dengan ketentuan dan aturan, tidak kurang dan tidak lebih." Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang mengkaji bagaimana perilaku ekonomi manusia dipengaruhi oleh agama Islam, yaitu tauhid dan ketaatan pada lima rukun Islam.

Tanpa mengubah arti atau definisi dari kata ekonomi itu sendiri, kata Islam muncul setelah kata ekonomi sebagai identitas. Dasar nilai ditentukan oleh definisi ekonomi. Ekonomi Islam memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil di masyarakat sehingga orang dapat memenuhi potensi mereka sebagai hamba Allah dan mencapai falah dalam kehidupan ini dan selanjutnya. (Muhlasin, 2018)

Ekonomi Islam mengukur kesejahteraan berdasarkan gagasan bahwa setiap anggota masyarakat harus memenuhi kebutuhannya, bukan berdasarkan penawaran atau permintaan ketika ada pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan mata uang atau indeks harga pasar. Akibatnya, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan setiap orang dalam masyarakat, oleh karena itu ekonomi Islam melakukan hal-hal berikut:

1. Manajemen real estat. Ekonomi Islam membagi properti menjadi tiga kategori. Awal: kepemilikan bersama Semua sumber daya, termasuk minyak, besi, tembaga, emas, dan gas, apakah itu padat, cair, atau gas, dianggap milik bersama. Ini termasuk Semua yang terdapat di dalam perut bumi, tambahan untuk semua industri berat yang berhubungan dengan energi dan energi itu sendiri. Dalam hal ini, negara hanya mengkaji dan menyebarkannya kepada rakyat dalam bentuk barang dan jasa. Kedua: kekayaan yang dimiliki oleh negara, termasuk negara. semua uang yang dikumpulkan oleh negara, termasuk semua bentuk perpajakan, serta semua perdagangan, industri, dan senjata yang berada di bawah kendalinya selain milik umum. Sesuai dengan kepentingan negara, negara mendanai semua ini. Ketiga: Produk tertentu. Hukum syariah dapat digunakan untuk mengatur properti ini oleh individu.
2. Memahami penggunaan emas dan perak dalam sistem moneter Islam adalah penting. Kertas pengganti harus memiliki lapisan emas dan perak yang dapat dipertukarkan dan menunjukkan karakteristik yang sama. Akibatnya, mata uang fiat suatu negara tidak diatur oleh negara lain. Uang, di sisi lain, memiliki nilai intrinsik yang tidak pernah berubah.
ekonomi negara akan mendapat manfaat dengan menyingkirkan uang emas dan peraknya dan menggantinya dengan uang kertas yang diperoleh dengan tenaga kerja. Karena dominasi dolar yang tidak secara langsung ditopang oleh emas, sistem ekonomi sangat rentan terhadap perubahan nilai dolar. Kejutan apa pun di Amerika, sekecil apa pun, langsung menyebar ke seluruh dunia. Selain karena uang digunakan sebagai barang dagangan (komoditas) di pasar uang yang menguntungkan, gejolak politik juga berdampak pada fluktuasi nilai mata uang.
3. Penghapusan Islam Ribawi.
Riba dilarang dalam ekonomi Islam, yang melibatkan pemberian pinjaman kepada mereka yang membutuhkan tanpa membebankan uang (bunga) tambahan kepada mereka. Orang bisa mendapatkan pinjaman untuk orang yang kurang mampu, termasuk petani, dari Baitulmal (Perbendaharaan Negara Islam), bahkan tanpa riba sekecil apapun.
4. Larangan system perdagangan di pasar non-riil
Mengenai pasar virtual, saat ini terdiri dari pasar uang, pasar berjangka (untuk komoditas seperti emas, CPO, pertambangan, dan energi), dan pasar surat berharga. Ekonomi Islam melarang penjualan produk sebelum vendor memiliki kepemilikan dan kendali atas produk tersebut. Dilarang menjual barang yang bukan milik siapa pun.

Dilarang mentransfer saham, obligasi, atau investasi lain di bawah kontrak yang meragukan. Islam melarang segala bentuk penipuan dan manipulasi yang didukung oleh kapitalisme yang mencari kebebasan properti. Inilah ekonomi Islam yang sejati, yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kesengsaraan ekonomi saat ini.

Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Islam

Harta orang miskin, anak yatim, dan orang-orang terlantar, termasuk mereka yang tidak mampu bekerja dan berjuang, tidak boleh menjadi perhatian sistem ekonomi Islam karena ekonomi Islam sangat menentang diskriminasi ekonomi, menolak mengabaikan yang lemah, dan melarang mengabaikan yang lemah dan rentan.

Pemberdayaan adalah proses memberi orang alat, peluang, informasi, dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi mereka dan mengamankan masa depan yang lebih baik. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan mengacu pada penciptaan sistem ekonomi kerakyatan oleh dan untuk umat, yang diambil dari masyarakat. Dengan menyadari potensi yang dimilikinya, masyarakat secara keseluruhan juga dapat meningkatkan keterampilannya. Sumber daya dikembangkan dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Dapat secara aktif mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah yang meningkatkan kekayaan dan kesejahteraannya dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Orang yang kurang mampu atau mereka yang belum menyadari potensi penuh mereka meningkat tidak hanya secara finansial tetapi juga dalam hal kebanggaan, kepastian, dan rasa hormat pada diri mereka sendiri.

Jika dicermati, sebenarnya ada tiga hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Islam. Pertama, pembangunan ekonomi bergantung pada sumber daya untuk pengelolaan ekonomi dan komersial secara umum. Sebagai ilustrasi perhatikan hasil produksi, tenaga kerja, hasil tabungan, investasi, ekspor-impor, dan kelangsungan usaha. Kedua, umat Islam harus menjalankan urusan ekonomi mereka sesuai dengan persyaratan etis hukum syariah. Tujuan ketiga adalah memperkuat ekonomi Islam sehingga dapat mendanai dakwah Islam, yang dapat berasal dari pilar-pilar ekonomi seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.

Untuk melengkapi syarat pertama, muslim yang berwirausaha perlu mengetahui jenis produk yang harus mereka ciptakan, baik berupa barang maupun jasa. Produk dan jasa tersebut tentunya harus sesuai dengan kriteria Khalalan Wa Thaiyyiban yang menyatakan bahwa produk dan jasa tersebut harus legal menurut syariat Islam dan tidak mengakibatkan kerugian atau kerusakan saat digunakan.

Dari perspektif Islam, tantangan ekonomi dan komersial memiliki tujuan kedua, dimensi etis dan syariah. Prinsip-prinsip bisnis Islam harus menjadi fondasi bisnis Muslim. Misalnya, menyesatkan pelanggan dengan memberikan contoh kualitas produk atau menimbun barang ketika ada kekurangan untuk mendapatkan keuntungan. Menjadikan umat Islam kekuatan ekonomi yang kuat dengan cara yang menguntungkan adalah tujuan ketiga. Otoritas Muslim saat ini hanya ada di level politik; non-Muslim terus memegang kekuasaan ekonomi. Muslim membelanjakan lebih dari yang mereka hasilkan. Menjadi konsumen adalah kekuatan tersendiri, tetapi non-Muslim memanfaatkan kekuatan itu jauh lebih banyak.

KESIMPULAN

Dengan menyadari potensi yang dimilikinya, masyarakat secara keseluruhan juga dapat meningkatkan keterampilannya. Sumber daya dikembangkan dalam upaya meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Dapat secara aktif mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah yang meningkatkan kekayaan dan kesejahteraannya dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Jika dicermati, sebenarnya ada tiga hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Islam. Perlu digarisbawahi bahwa memperluas pengembangan

komunitas atau pengembangan ekonomi yang dipimpin komunitas adalah dua cara agar komunitas Muslim dapat menjadi lebih kuat secara ekonomi. Peningkatan produksi, khususnya dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang telah ada untuk menghasilkan barang dan jasa yang tentunya memenuhi kriteria Khalalan Wa Thaiyyiban, dapat memperkuat ekonomi Islam dan membantu masyarakat dan dunia usaha mencapai kemandirian ekonomi. Kemiskinan pada akhirnya akan menurun di semua bidang kehidupan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan masyarakat dapat tercapai

Referensi

- Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish:2016)
- James Midgley, *Pembangunan Sosial Teori dan Praktik*(Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University : 2020)
- Hasniati,Ridha Nurul Mutia,Annisa, *Pemberdayaan ekonomi umat melalui peningkatan produksi dalam sistem ekonomi islam*,Balance Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam
- Mahri, A. Jajang . W dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta :Penerbit :Departemen Ekonomi Keuangan Syariah – Bank Indonesia: 2021)
- Muhlasin,Muhammad Soim, *Peta Sosial Ekonomi Ummat (Studi Terhadap Lembaga ekonomi dalam Pemberdayaan Masyarakat)*, Vol. 29 , Risalah, 2018 hal 56